



KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tim Peneliti:

D. Desembriarto
Maria Isabella Chrissanti
Dwi Endah Cahyani
Fatmah Budiani Arini
Wahyuningtyas Puspitasari

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tahun 2022

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI ANTARKABUPATEN/KOTA
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARKABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tim Penulis:

Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si., M.A.

Maria Isabella Chrissanti, S.Si., M.Pd.

Dwi Endah Cahyani, S.T., M.URP.

Fatmah Budiani Arini, S.Si.

Wahyuningtyas Puspitasari, S.E.

Tahun 2022

**Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarkabupaten/Kota Se-Daerah
Istimewa Yogyakarta**

© Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si., M.A., Maria Isabella Chrissanti, S.Si., M.Pd.,
Dwi Endah Cahyani, S.T., M.URP., Fatmah Budiani Arini, S.Si., Wahyuningtyas
Puspitasari, S.E., 2022

Pemeriksa aksara: Dyah Permatasari

Tata letak: Rio

Desain sampul: Alfian S.

Cetakan pertama, Februari 2022

xii + 58 halaman

17 x 25 cm

ISBN Cetak: 978-623-240-653-7

ISBN Digital: 978-623-240-654-4

Diterbitkan oleh:



Anggota IKAPI (062/ DIY/ 08)

Jl. Melati No 171, Sambilegi Baru Kidul,

Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

Telepon: (0274) 2801996, Fax: (0274) 485222

Email: diandracreative@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/diandrapenerbit>

Instagram: @penerbitdiandra

Website: www.diandracreative.com

Dicetak oleh:

Percetakan Diandra

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved



KATA PENGANTAR

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi dan sumber daya untuk melakukan pembangunan wilayah dan sosial. DIY memiliki sumber daya alam berupa bentang alam yang beragam serta sumber daya manusia berkualitas. Selain berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki, DIY juga masih memiliki beberapa permasalahan yang menjadi fokus untuk diselesaikan. Di dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2017–2022 disebutkan beberapa permasalahan pokok yang dialami DIY, yaitu: ketimpangan antarwilayah; kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah; keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Permasalahan ketimpangan pendapatan antardaerah di DIY menjadi salah satu isu yang menarik untuk digali. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulisan buku *Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarkabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta*. Buku ini merupakan hasil kajian yang berfokus pada kondisi ketimpangan pembangunan ekonomi antarkabupaten/kota di DIY yang menggunakan indikator pendapatan per kapita. Hasil tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan DIY yang kita cintai bersama.

Kepala BAPPEDA DIY

Drs. Beny Suharsono, M.Si.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	xi
 BAGIAN I : GAMBARAN PEREKONOMIAN DIY	1
 BAGIAN II : PDRB, PENDAPATAN PER KAPITA, KETIMPANGAN PEMBANGUNAN, INDEKS WILLIAMSON, KOEFSISIEN VARIASI, HIPOTESIS KONVERGENSI, DAN KAJIAN TENTANG PERTUMBUHAN EKONOMI LINGKUP DIY ...	9
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
2.2 Pendapatan per Kapita.....	12
2.3 Ketimpangan Pembangunan.....	12
2.4 Indeks Williamson.....	14
2.5 Koefisien Variasi.....	15

2.6 Hipotesis Konvergensi	15
2.7 Beberapa Kajian tentang Pertumbuhan Ekonomi Lingkup DIY	18

BAGIAN III : ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN	
EKONOMI ANTARWILAYAH DI DIY	22
3.1 Analisis Deskriptif Kondisi Perekonomian DIY	22
3.2 Analisis Konvergensi Sigma	28
3.3 Analisis Konvergensi Beta	33
3.4 Analisis Deskriptif Pengaruh APBD terhadap Penurunan Ketimpangan Pembangunan.....	44
3.5 Solusi Mengatasi Permasalahan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarkabupaten/Kota di DIY	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2016–2021 (Juta Rupiah)	2
Gambar 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2016–2021 (dalam Persen).....	3
Gambar 1.3 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2016–2021 (dalam Juta Rupiah).....	4
Gambar 1.4 PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2016–2021 (dalam Juta Rupiah)	4
Gambar 1.5 Rata-Rata Pangsa Kontribusi PDRB ADHK Tiap Kabupaten/Kota se-DIY terhadap PDRB DIY Tahun 2016–2021 (dalam Persen).....	5
Gambar 1.6 Rata-Rata Pangsa Kontribusi PDRB ADHB Tiap Kabupaten/Kota se-DIY terhadap PDRB DIY Tahun 2016–2021 (dalam Persen).....	6
Gambar 1.7 Pendapatan per Kapita di Kabupaten/ Kota di DIY	7
Gambar 3.1 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2010–2021 (dalam Miliar Rupiah).....	22

Gambar 3.2 Rata-Rata Pangsa Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Keseluruhan Penduduk DIY Tahun 2010–2021 (dalam Persen).....	23
Gambar 3.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2011–2021 (dalam Miliar Rupiah).....	24
Gambar 3.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2011–2021 (dalam Jiwa)	25
Gambar 3.5 Rata-Rata Pangsa Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Keseluruhan Penduduk DIY Tahun 2010–2021 (dalam Persen).....	26
Gambar 3.6 Perkembangan Pendapatan Rill per Kapita Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2011–2021 (dalam Jiwa).....	27
Gambar 3.7 Perkembangan Indeks Williamson dan Koefisien Variasi 2010–2021	28
Gambar 3.8 Nilai dan Kecenderungan Perkembangan Indeks Williamson Tahun 2010–2021	29
Gambar 3.9 Nilai dan Kecenderungan Perkembangan Koefisien Variasi Tahun 2010–2021	30
Gambar 3.10 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota se-DIY Tahun 2010–2021	44
Gambar 3.11 Perkembangan APBD per Kapita Kabupaten dan Kota se-DIY Tahun 2010–2021	45



Daftar Tabel

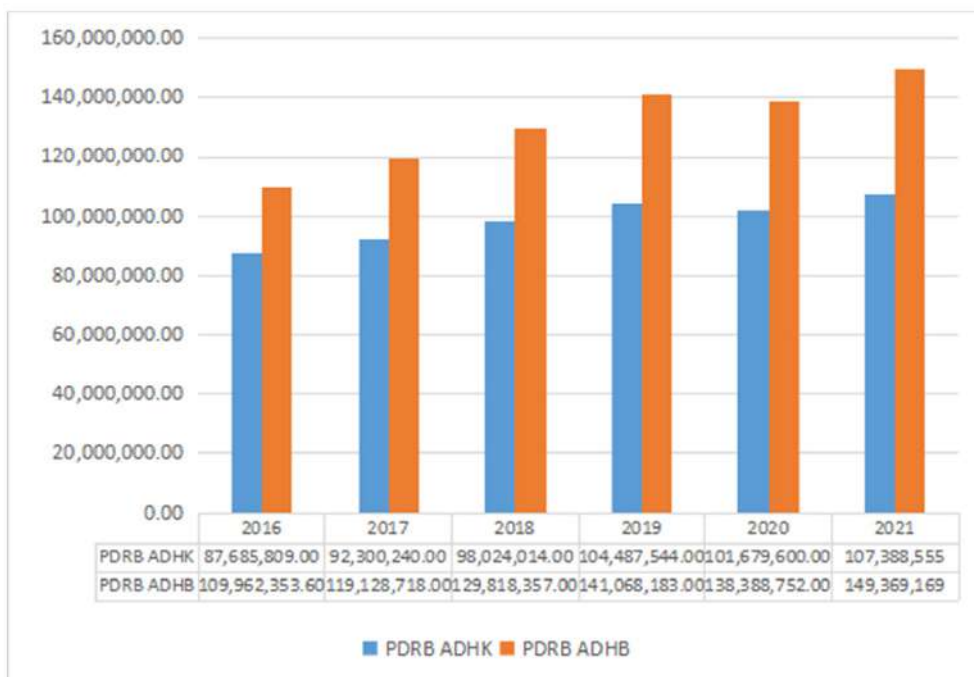
Tabel 3.1 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel	36
Tabel 3.2 Hasil Estimasi Model <i>Fixed Effect</i>	39
Tabel 3.3 Hasil Estimasi Model <i>Fixed Effect</i>	42



BAGIAN I

GAMBARAN PEREKONOMIAN DIY

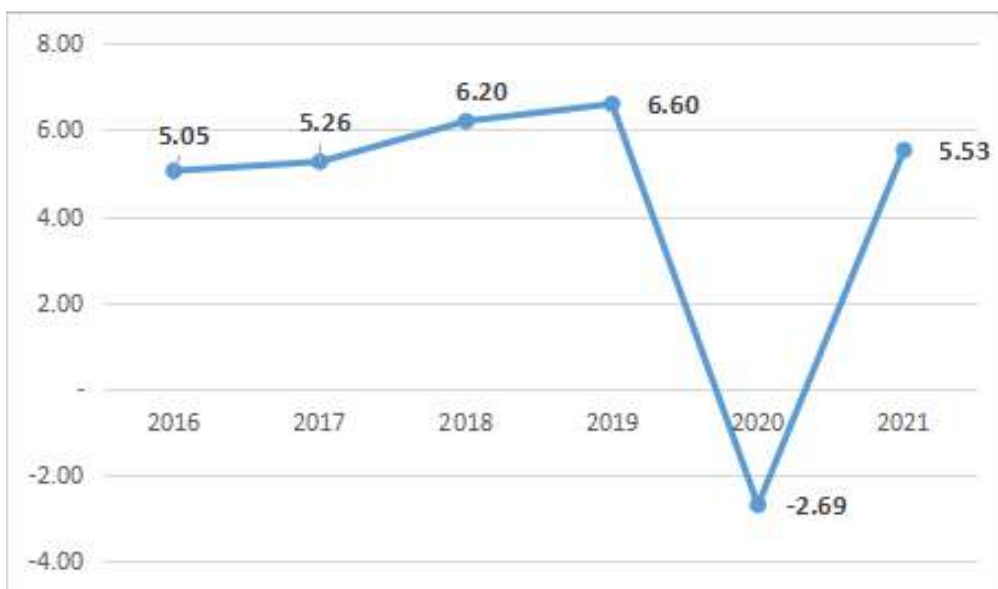
Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan kecenderungan peningkatan kapasitas ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB). Sejak tahun 2016 sampai 2019, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk DIY meningkat dari Rp67,98 triliun (ADHK) dan Rp109,962 triliun (ADHB) di tahun 2016 menjadi Rp104,49 triliun (ADHK) dan Rp141,07 triliun (ADHB) di tahun 2019. Kapasitas perekonomian mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. PDRB ADHK turun menjadi Rp101,68 triliun dan PDRB ADHB turun menjadi Rp138,39 triliun. Di tahun berikutnya, PDRB kembali meningkat dengan nilai menjadi Rp107,39 triliun (ADHK) dan Rp149,37 triliun (ADHB) seiring dengan kondisi dampak pandemi yang lebih terkendali dan progres vaksinasi di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

Gambar 1.1 Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2016–2021 (Juta Rupiah)

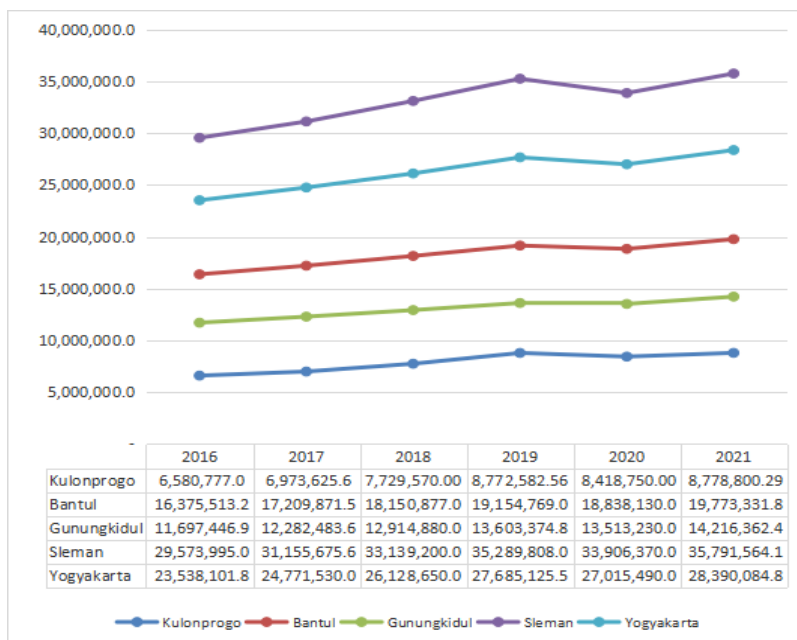
Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan meningkat dari tahun 2016–2019. Tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,60%. Pertumbuhan hanya menunjukkan kontraksi di tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -2,69%. Pada tahun 2021, perekonomian DIY kembali menunjukkan dinamika ekspansif dengan tingkat pertumbuhan 5,53%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

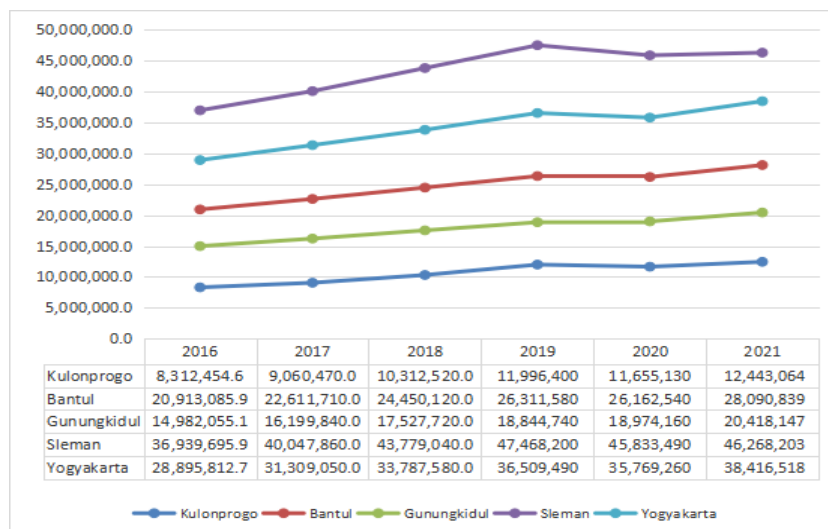
Gambar 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2016–2021 (dalam Persen)

Pada tingkat kabupaten/kota se-DIY, kinerja perekonomian juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun ke tahun selama tahun 2016–2019, tetapi menunjukkan adanya disparitas. PDRB, baik ADHK maupun ADHB, menunjukkan perbedaan antarwilayah. Kabupaten Sleman senantiasa mencapai tingkat PDRB tertinggi, kemudian diikuti Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Kulon Progo adalah wilayah dengan capaian PDRB terendah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

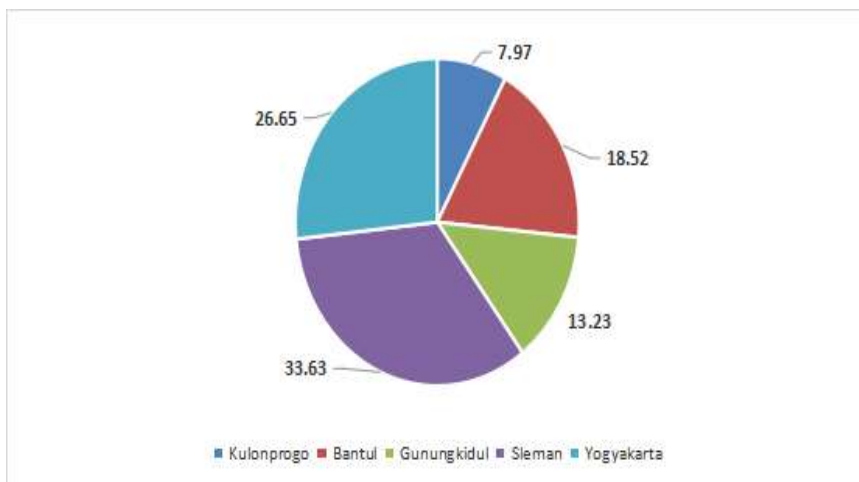
Gambar 1.3 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2016–2021 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi DIY, beberapa tahun

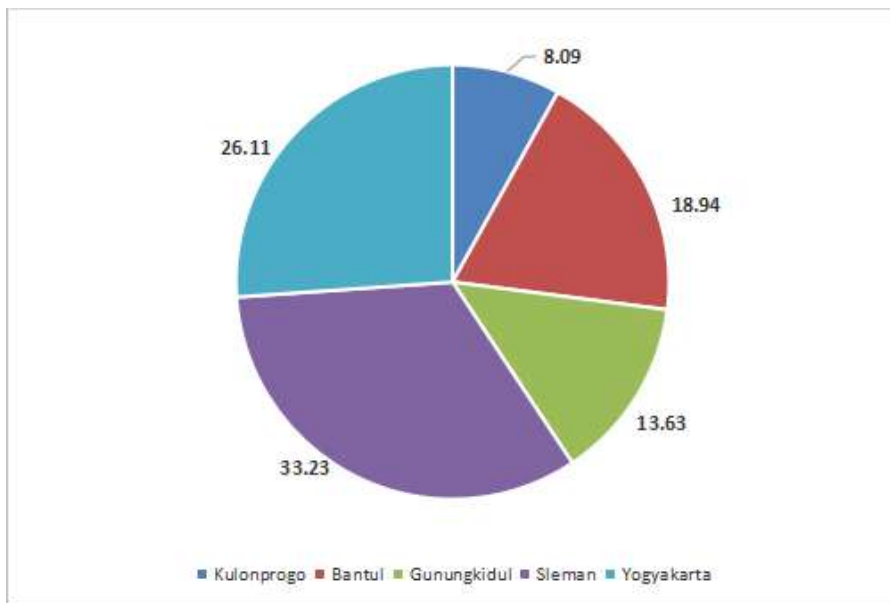
Gambar 1.4 PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2016–2021 (dalam Juta Rupiah)

Perbedaan perkembangan PDRB menyebabkan sumbangan masing-masing wilayah berbeda bagi keseluruhan PDRB DIY. Selama kurun waktu tahun 2016–2021, rata-rata kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Sleman mencapai 33,63% dan Kota Yogyakarta mencapai 26,65% dari total PDRB ADHK DIY. Kulon Progo hanya menyumbang 7,97%; Kabupaten Bantul menyumbang sebesar 18,52%. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memberikan sumbangan paling kecil, yaitu sebesar 13,23%. Selama periode tersebut, rata-rata kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mencapai 59,34% dari total PDRB ADHB DIY, dengan sumbangan dari Kabupaten Sleman sebesar 33,23% dan Kota Yogyakarta sebesar 26,11%. Kabupaten Bantul menyumbang sebesar 18,94% dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 13,63%. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo memberikan sumbangan paling kecil, yaitu sebesar 8,09%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, olahan

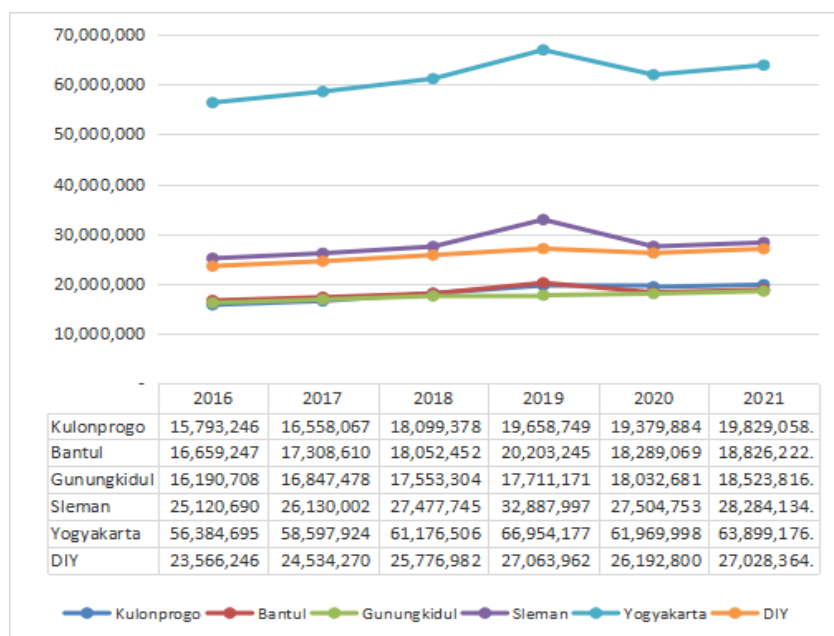
Gambar 1.5 Rata-Rata Pangsa Kontribusi PDRB ADHK Tiap Kabupaten/Kota se-DIY terhadap PDRB DIY Tahun 2016–2021 (dalam Persen)



Sumber: BPS Provinsi DIY, olahan

Gambar 1.6 Rata-Rata Pangsa Kontribusi PDRB ADHB Tiap Kabupaten/Kota se-DIY terhadap PDRB DIY Tahun 2016–2021 (dalam Persen)

Perbedaan kapasitas perekonomian atau pembangunan perekonomian antarwilayah berimplikasi pada perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antara kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan adanya disparitas. Kesejahteraan tersebut dicerminkan dengan pendapatan per kapita dengan *proxy* PDRB per kapita. Berdasarkan data, selama kurun waktu tahun 2016–2021, pendapatan per kapita Kota Yogyakarta merupakan pendapatan tertinggi. Pendapatan per kapita Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman berada di atas rata-rata DIY, sedangkan pendapatan per kapita tiga kabupaten lainnya senantiasa berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY, olahan

Gambar 1.7 Pendapatan per Kapita di Kabupaten/ Kota di DIY

Ketimpangan hasil pembangunan adalah masalah yang berkelanjutan serta merupakan tantangan terkini pada proses pembangunan daerah di banyak negara (Shankar dan Anwar, 2003; Prastowo, dkk., 2014; dan Pito, 2013 dalam Aini, Harianto dan Puspitawati, 2016). Ketimpangan pembangunan, terutama disparitas kinerja pembangunan ekonomi, mencerminkan aspek ketidakadilan baik antara wilayah maupun penduduk, serta kekurangberpihakan pada yang lebih tertinggal dan lemah. Lebih lanjut, ketimpangan pembangunan antardaerah akan berimplikasi terhadap masalah tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang tertinggal atau kurang maju. Selain itu, ketimpangan dapat berakibat pada kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat serta lebih lanjut dapat berimplikasi pada politik dan ketenteraman masyarakat (Simbolon, 2009).

Masalah yang ditimbulkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah menjadi dasar pentingnya penurunan ketimpangan atau konvergensi kesejahteraan ekonomi antarwilayah. Masalah tersebut juga dihadapi DIY sehingga Pemerintah Daerah DIY perlu melakukan kajian untuk mengetahui kecenderungan ketimpangan pembangunan antarwilayah sehingga dampak akibat ketimpangan tersebut dapat dihindari.

Kapasitas perekonomian/pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi penduduk DIY yang diukur dengan pendapatan per kapita selalu meningkat, tetapi terdapat ketimpangan perkembangan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan ekonomi antarwilayah di DIY. Untuk itu, perlu dianalisis perkembangan ketimpangan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan ekonomi antarwilayah di DIY.



BAGIAN II

PDRB, PENDAPATAN PER KAPITA, KETIMPANGAN PEMBANGUNAN, INDEKS WILLIAMSON, KOEFISIEN VARIASI, HIPOTESIS KONVERGENSI, DAN KAJIAN TENTANG PERTUMBUHAN EKONOMI LINGKUP DIY

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi atau kapasitas suatu perekonomian negara atau daerah dalam suatu periode tertentu. Secara umum, PDRB digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian sebuah negara atau daerah serta sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat. PDRB pada dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Walaupun perhitungan produk atau *output* negara atau daerah ini bukan merupakan ilmu yang pasti, perhitungan tersebut memberikan informasi kinerja ekonomi dan

bagaimana produksi/pendapatan dihasilkan serta pengeluaran dialokasikan. PDRB dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

2.1.1 Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun. Di Indonesia, unit-unit produksi dalam penghitungan PDRB dikelompokkan dalam lapangan usaha (sektor), yaitu: (A) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (B) pertambangan dan penggalian; (C) industri pengolahan; (D) pengadaan listrik dan gas; (E) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; (F) konstruksi; (G) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (H) transportasi dan pergudangan; (I) penyediaan akomodasi dan makan minum; (J) informasi dan komunikasi; (K) jasa keuangan dan asuransi; (L) *real estate*; (M, N) jasa perusahaan; (O) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; (P) jasa pendidikan; (Q) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; (R, S, T, U) jasa lainnya.

2.1.2 Pendekatan Pengeluaran

Di Indonesia, PDRB dalam pendekatan pengeluaran didefinisikan sebagai semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; (2) konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal tetap domestik bruto; (4) perubahan inventori; serta 5) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Dari dimensi pengeluaran kontribusi masing-masing permintaan

agregat terhadap pengeluaran PDRB tidak terjadi banyak perubahan, pola pertumbuhan masih bercirikan *consumption driven growth*, serta pertumbuhan yang didominasi oleh konsumsi masyarakat.

2.1.3 Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang besarnya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Secara konseptual, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan, serta harus sama juga dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena di dalamnya sudah tercakup pajak tak langsung neto.

Sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu, PDRB dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa

tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

2.2 Pendapatan per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara juga biasanya didasarkan pada pendapatan per kapita yang didasarkan pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (Kumara, Gunarto, dan Ratih, 2021). PDB per kapita yang merupakan pembagian nilai PDB dibandingkan total populasi suatu negara, merupakan instrumen yang baik untuk mengetahui tingkat standar hidup penduduk suatu negara (Mankiw, 2006, dalam Kumara, Gunarto, dan Ratih, 2021). Semakin besar nilai pendapatan per kapita, semakin sejahtera anggota sosial suatu negara, serta dianggap semakin berhasil pembangunan ekonomi. Pada tataran regional dalam suatu negara, PDRB per kapita mencerminkan nilai *output* rata-rata yang dihasilkan oleh setiap penduduk daerah yang memiliki nilai PDRB terkait. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk (Wijayanto, 2016).

2.3 Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan menurut Kuncoro (2006) merupakan kesenjangan yang mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Penyebab kesenjangan antarwilayah adalah adanya perbedaan faktor anugerah awal (*endowment factor*) (Kuncoro, 2006 dan Sjafrizal, 2012). Perbedaan ini yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan di

berbagai wilayah sehingga menimbulkan gap atau perbedaan kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Ketimpangan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi sebab adanya perbedaan kandungan sumber daya alam (SDA) dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing wilayah (Sjafrizal, 2012). Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu, pada setiap negara atau daerah biasanya terdapat wilayah lebih sejahtera atau maju (*developed region*) serta wilayah kurang sejahtera atau kurang maju atau terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah ini membawa implikasi terhadap disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah.

Isu dan permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah mula-mula dimunculkan secara teoretis oleh Douglas C. North. Analisis teori pertumbuhan neoklasik oleh Douglas C. North memunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah di negara bersangkutan. Prediksi ini kemudian dikenal sebagai hipotesis neoklasik. Menurut hipotesis ini, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat pada permulaan proses pembangunan suatu negara. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak yang kemudian seiring dengan proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Kebenaran hipotesis neoklasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* (Sjafrizal, 2008).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis neoklasik yang diformulasi secara teoretis terbukti benar secara empiris. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.

2.4 Indeks Williamson

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antardaerah (regional) adalah indeks ketimpangan daerah yang diperkenalkan oleh Jeffry G. Williamson. Indeks Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan per kapita antardaerah. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin kecil nilai indeks tersebut maka tingkat ketimpangannya semakin kecil, sebaliknya ketimpangan semakin besar jika nilai indeks semakin mendekati 1.

Tingkat ketimpangan yang diukur oleh Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan yang terjadi di daerah tingkat di bawahnya. Misalnya, Indeks Williamson provinsi menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota di provinsi tersebut. Rumus penghitungan Indeks Williamson dapat ditulis sebagai berikut (Muta'ali, 2015):

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Keterangan:

IW: Indeks Williamson

Y_i : PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y : PDRB per kapita provinsi

f_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n : Jumlah penduduk provinsi

2.5 Koefisien Variasi

Suatu ukuran penyebaran satu rangkaian data digunakan untuk mengetahui persebaran nilai masing-masing anggota rangkaian data tersebut terhadap rata-ratanya. Salah satu ukuran tersebut adalah koefisien variasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien variasi adalah:

$$KV = \sigma/\mu \times 100\%$$

Keterangan:

KV : Koefisien variasi

σ : Standar deviasi

μ : Rata-rata

Semakin besar nilai koefisien tersebut maka persebaran data terhadap nilai rata-rata menjadi semakin besar. Jika diterapkan dalam analisis ketimpangan pendapatan per kapita, nilai koefisien variasi dari satu rangkaian data pendapatan yang semakin besar maka ketimpangan antardata di dalam rangkaian tersebut makin besar.

2.6 Hipotesis Konvergensi

Hipotesis terjadinya konvergensi pendapatan per kapita diturunkan dari fungsi produksi Solow dan Swan (Barro dan Martin, 1992). Fungsi produksi Solow dan Swan menyatakan bahwa tingkat *output* yang dihasilkan dalam suatu fungsi produksi ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja yang

digunakan dalam proses produksi tersebut. Secara matematis, fungsi produksi Solow dan Swan dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = f(K, L)$$

Keterangan:

Y : *Output*

K : Modal

L : Tenaga kerja

Jika masing-masing dibagi dengan L maka akan menghasilkan persamaan:

$$Y = f(k)$$

di mana $k = K/L$ adalah rasio modal-tenaga kerja dan $y = Y/L$ adalah *output* per kapita.

Perubahan stok modal sebesar $\dot{K} = 1-\sigma K = sF(K,L,t) - \sigma K$ di mana σ adalah depresiasi dan s adalah tingkat *output* yang ditabung. Jika persamaan tersebut dibagi dengan L maka persamaan tersebut menjadi:

$$\dot{K}/L = \dot{k} = s.f(k) - \sigma K$$

Jika $n = \dot{L}/L$, di mana n adalah pertumbuhan tenaga kerja maka persamaan tersebut menjadi:

$$\dot{k} = s.f(k) - (n+\sigma)k$$

Dari uraian di atas maka pertumbuhan modal dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$y_k = \dot{k}/K = s \cdot f(k)/k - (n - \sigma)$$

Turunan dari persamaan di atas adalah $dy_k/dk = s[f(k) - f(k)/k]k < 0$. Jika faktor lain dianggap konstan, semakin kecil nilai k berhubungan dengan semakin besar nilai y_k atau semakin kecil modal per penduduk akan menyebabkan semakin tinggi pertumbuhan kapital per kapita. Hal tersebut berimplikasi bahwa ekonomi yang kurang maju akan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi yang lebih maju sehingga pendapatan per kapita keduanya akan mencapai tingkat yang sama. Hipotesis tersebut disebut sebagai konvergensi.

Dua alasan yang menjelaskan terjadinya konvergensi menurut Sachs (1993), yaitu:

1. Perbedaan tingkat *output* per kapita antarnegara atau daerah terjadi karena perbedaan rasio modal dengan tenaga kerja antarnegara atau daerah. Negara atau daerah yang lebih makmur memiliki rasio modal per tenaga kerja yang lebih besar sehingga *return on capital*-nya rendah. Negara yang kurang makmur memiliki rasio yang lebih kecil dan *return on capital*-nya lebih tinggi. Hal itu mendorong terjadinya aliran modal dari negara atau daerah yang lebih makmur ke daerah yang kurang makmur.
2. Perbedaan *output* per kapita terjadi karena perbedaan teknologi. Aliran teknologi terjadi dari daerah berteknologi tinggi ke daerah berteknologi rendah. Aliran tersebut melalui beberapa cara, antara lain yaitu transfer teknologi, investasi langsung, pembelian mesin produksi oleh daerah yang kurang makmur.

Secara teoretis, terdapat dua ukuran konvergensi, yaitu konvergensi σ dan β (Tajerin, Fauzi, Juanda, dan Adrianto, 2013; Utama dan Maski, 2018). Konvergensi σ (sigma) mengindikasikan kejadian di mana semakin kecilnya ketimpangan suatu variabel dalam kurun waktu tertentu di suatu daerah. Adanya konvergensi tersebut dapat ditunjukkan dari penurunan koefisien variasi pendapatan per kapita. Jika koefisien tersebut mengalami penurunan dari waktu ke waktu maka dapat dikatakan terjadi konvergensi sigma di wilayah tersebut. Konvergensi β (beta) mengindikasikan variabel pendapatan per kapita daerah atau wilayah miskin untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah kaya. Hipotesis konvergensi beta mempunyai asumsi bahwa terdapat korelasi tingkat pendapatan per kapita awal dan tingkat pertumbuhan, yaitu jika variabel pendapatan per kapita bernilai kurang dari 1.

Konsep konvergensi terkait erat dengan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi regional (Kharisma dan Saleh, 2013). Inisiatif untuk mencapai konvergensi berimplikasi bahwa pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga mendorong terjadinya proses “*catch up*” daerah yang kurang makmur terhadap daerah yang lebih makmur. Proses “*catch up*” tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara daerah yang kurang makmur dengan yang lebih makmur.

2.7 Beberapa Kajian tentang Pertumbuhan Ekonomi Lingkup DIY

Berikut ini adalah beberapa kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi DIY:

- a) Wahyudin dan Yuliadi (2013) meneliti tentang faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), dan Tenaga Kerja di lima kabupaten dan kota se-DIY. Hasil analisis dengan menggunakan data panel dalam kurun waktu (2016–2018) menemukan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti peningkatan PMDN sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan sebesar 0,10; APBD berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti peningkatan APBD sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan sebesar 0,10; tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini berarti bahwa peningkatan tenaga kerja sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di DIY mengalami penurunan sebesar -0,67. Hal ini disebabkan karena peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi. Peningkatan marginal produksi akan terus bertambah jika jumlah tenaga kerja terus ditambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal. Pada saat jumlah produksi maksimal, penambahan jumlah tenaga kerja akan menurunkan jumlah produksi (TP) sehingga produksi akan bernilai negatif.

- b) Penelitian Budidharma (2015) menemukan adanya pengaruh yang positif antara faktor pembentuk modal manusia yang diwakili oleh aspek pendidikan dengan indikator angka partisipasi kasar dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi juga menunjukkan pengaruh positif terhadap PDRB DIY. Namun demikian, variabel jumlah pekerja tidak memengaruhi pertumbuhan secara signifikan. Temuan lain dari laporan data ketenagakerjaan mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan persentase pekerja di DIY yang berpendidikan rendah. Sementara itu, tenaga kerja berpendidikan menengah diduga memilih bekerja di luar DIY.

- c) Cahyo (2016) meneliti tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ekspor, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi kabupaten sekitar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Dari penelitiannya diperoleh kesimpulan mengenai empat hal. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY. Kondisi ini dapat terjadi karena semakin baik kualitas pembangunan manusia di suatu daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ekspor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah mengakibatkan biaya produksi menjadi naik dan kemudian harga barang yang diekspor ke luar negeri menjadi mahal. Selain itu, barang yang dijual ke luar negeri kalah bersaing dengan negara lain. Ketiga, tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan tenaga kerja di DIY yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Keempat, pertumbuhan ekonomi daerah Purworejo tidak berpengaruh, pertumbuhan ekonomi daerah Magelang berpengaruh negatif, serta pertumbuhan ekonomi daerah Klaten tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi DIY.
- d) Dagu dan Widayat (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek dari jumlah tenaga kerja, realisasi investasi (PMDN), realisasi pengeluaran pemerintah (APBD), dan ekspor sebagai variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi DIY tahun 1980–2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) jumlah tenaga kerja, realisasi PMDN, realisasi APBD dan ekspor secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB; (2) dalam jangka pendek, hanya

jumlah tenaga kerja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB, sementara realisasi PMDN, realisasi APBD, dan ekspor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB DIY. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja, realisasi PMDN, realisasi APBD, dan ekspor merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi hanya jumlah tenaga kerja.

- e) Nurhayati (2017) meneliti tentang pengaruh belanja modal pemerintah, tenaga kerja, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota se-DIY. Hasil kajian dengan menganalisis data tahun 2005 sampai 2015 menemukan bahwa belanja modal pemerintah, tenaga kerja, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



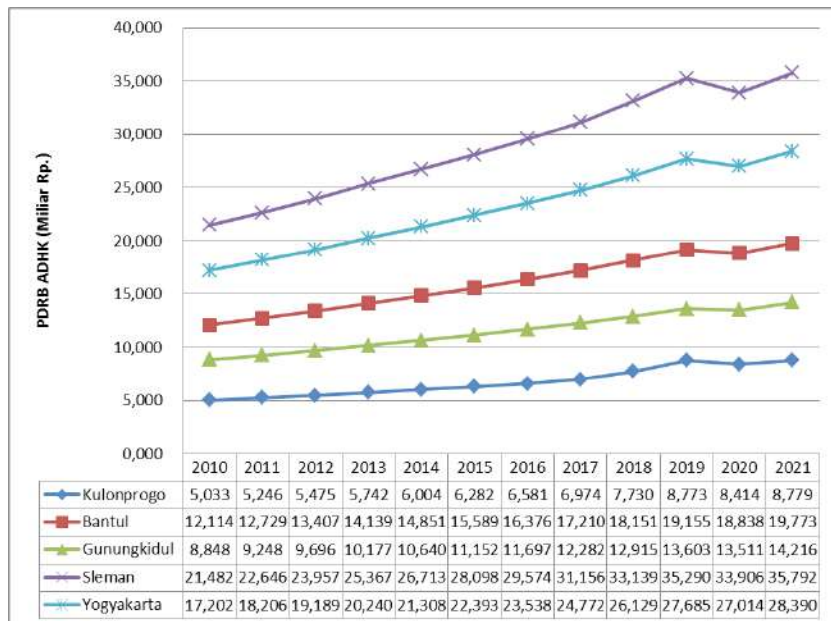
BAGIAN III

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARWILAYAH DI DIY

3.1 Analisis Deskriptif Kondisi Perekonomian DIY

3.1.1 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan PDRB ADHK kabupaten dan kota se-DIY disajikan pada grafik sebagai berikut.

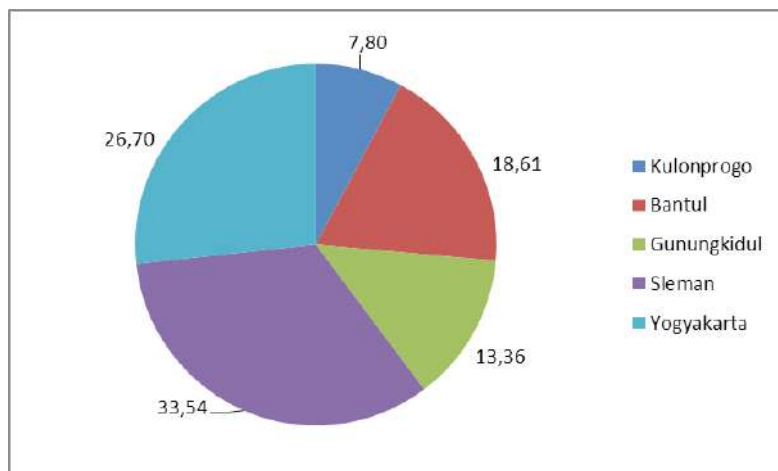


Sumber: BPS DIY, beberapa tahun

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2010–2021 (dalam Miliar Rupiah)

Perkembangan PDRB ADHK semua daerah menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang mencapai tingkat *output* riil tertinggi. Pada tahun 2010, PDRB ADHK Kabupaten Sleman adalah Rp21,482 triliun dan meningkat menjadi Rp35,792 triliun di tahun 2021. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang mencapai tingkat *output* riil terbesar kedua. Daerah yang menghasilkan PDRB ADHK terendah adalah Kabupaten Kulon Progo dengan nilai PDRB sebesar Rp5,033 triliun di tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp8,779 di tahun 2021.

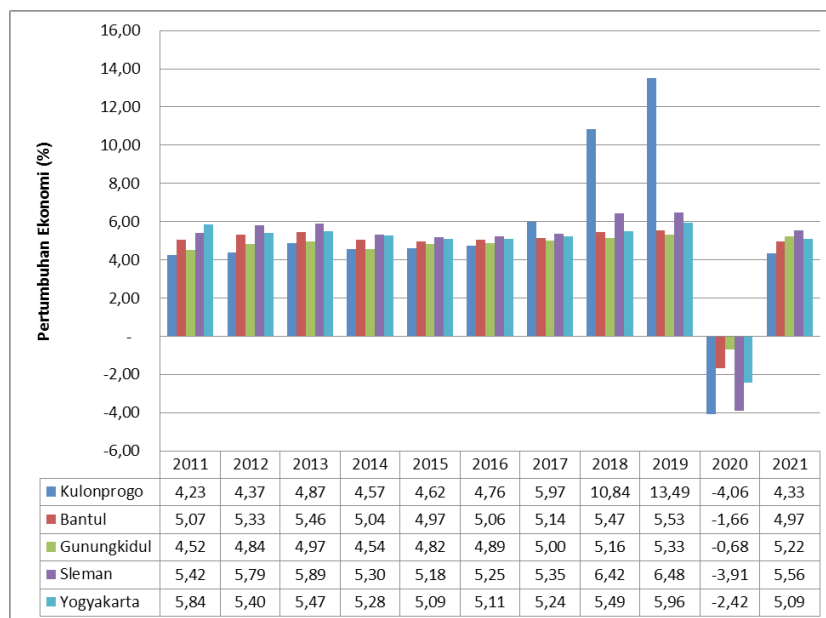
Grafik berikut menggambarkan proporsi rata-rata sumbangan PDRB ADHK masing-masing daerah terhadap PDRB ADHK total DIY. Kabupaten Sleman mendominasi sumbangan PDRB ADHK dengan pangsa sebesar 33,54%. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah penyumbang PDRB ADHK terkecil, yaitu sebesar 7,80%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, olahan

Gambar 3.2 Rata-Rata Pangsa Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Keseluruhan Penduduk DIY Tahun 2010–2021 (dalam Persen)

Tren peningkatan PDRB ADHK didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang hampir selalu positif, kecuali di tahun 2020 yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota disajikan pada grafik berikut.



Sumber: BPS DIY, beberapa tahun

Gambar 3.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2011–2021 (dalam Miliar Rupiah)

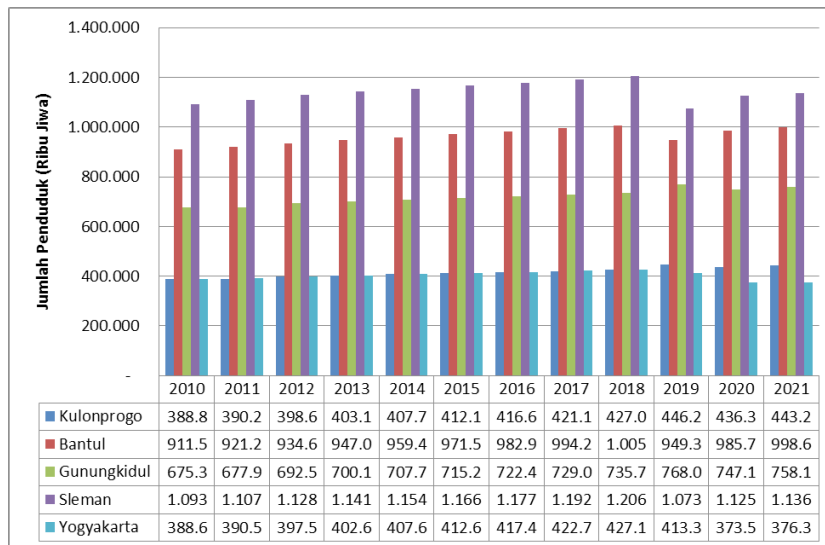
Perbandingan pertumbuhan ekonomi antarkabupaten dan kota menunjukkan dinamika. Selama tahun 2011 sampai 2016, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan dua daerah yang mencapai tingkat pertumbuhan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Selama periode tersebut, Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi terendah. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sampai 2019 karena didukung oleh beberapa proyek konstruksi

besar, terutama pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Kabupaten tersebut bahkan dapat mencapai tingkat pertumbuhan di atas 10% di tahun 2018 dan 2019.

Di tahun 2020, semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Kabupaten Kulon Progo mengalami kontraksi paling besar dengan tumbuh -4,06%. Di tahun 2021 ketika semua perekonomian mengalami *rebound* aktivitas ekonomi, Kabupaten Kulon Progo tetap mencapai tingkat pertumbuhan terendah dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,33% sedangkan Kabupaten Sleman mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi, yaitu 5,56%.

3.1.2 Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di kabupaten dan kota disajikan pada grafik berikut ini.

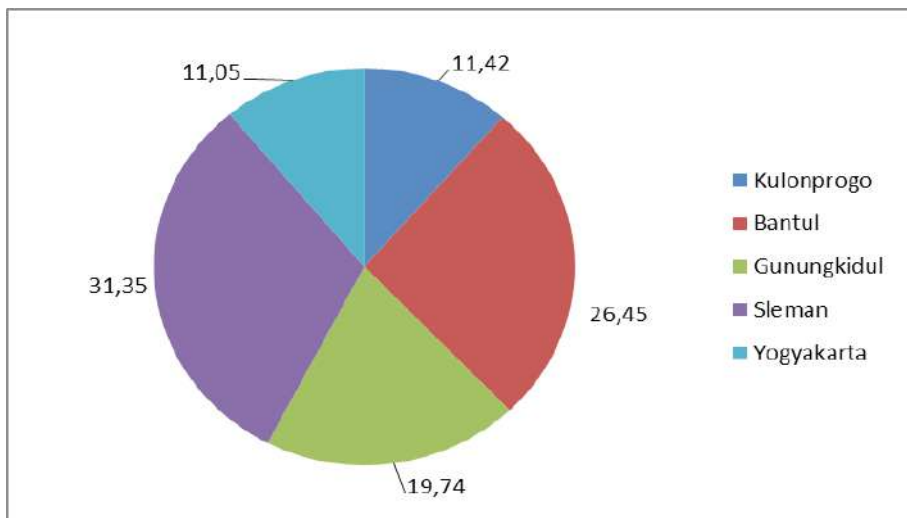


Sumber: BPS DIY, beberapa tahun

Gambar 3.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2011–2021 (dalam Jiwa)

Perbandingan jumlah penduduk antardaerah, relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Sleman dengan jumlah 1,093 juta jiwa di tahun 2010 dan meningkat menjadi 1,136 jiwa di tahun 2021. Jumlah penduduk paling sedikit berada di Kota Yogyakarta dengan jumlah 388,6 ribu jiwa di tahun 2010 dan meningkat menjadi 427,1 ribu di tahun 2018, tetapi kemudian menurun menjadi 376,3 ribu di tahun 2021.

Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2021, proporsi jumlah penduduk masing-masing daerah disajikan pada grafik berikut ini. Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sleman berkontribusi terbesar, yaitu 31,35% dari keseluruhan penduduk DIY. Sementara itu, Kota Yogyakarta menyumbang proporsi terkecil dengan pangsa sebesar 11,05%.

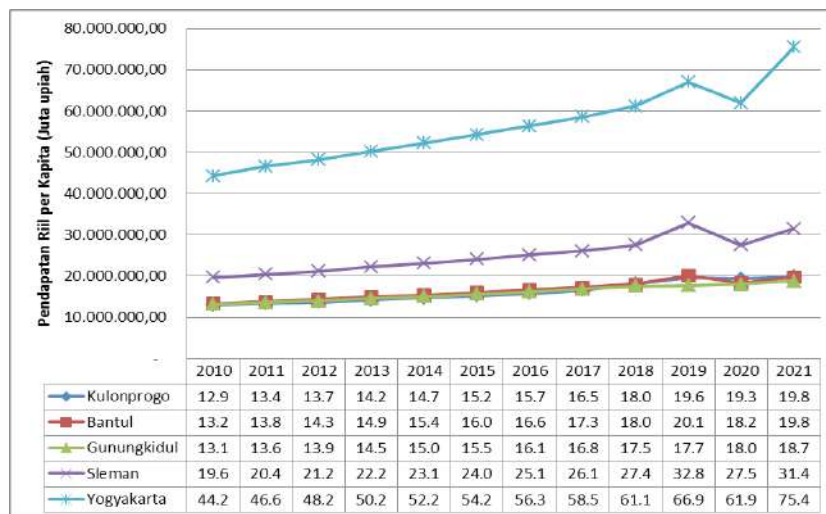


Sumber: BPS Provinsi DIY, olahan

Gambar 3.5 Rata-Rata Pangsa Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Keseluruhan Penduduk DIY Tahun 2010–2021 (dalam Persen)

3.1.3 PDRB ADHK per Kapita

Perkembangan PDRB ADHK per Kapita (pendapatan riil per kapita) kabupaten dan kota disajikan pada grafik berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi DIY, olahan

Gambar 3.6 Perkembangan Pendapatan Riil per Kapita Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2011–2021 (dalam Jiwa)

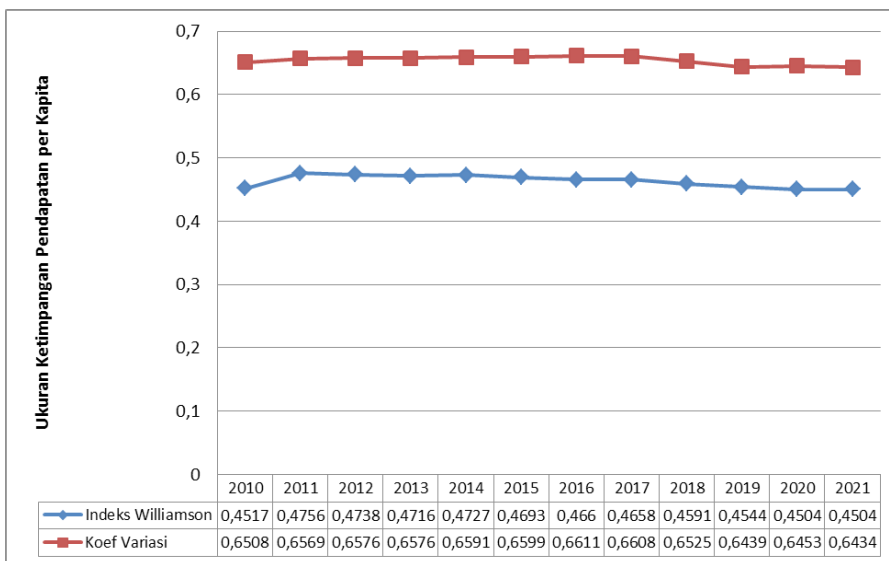
Kota Yogyakarta merupakan daerah yang mencapai tingkat pendapatan riil per kapita tertinggi, yaitu Rp44,2 juta per kapita per tahun di tahun 2010 yang meningkat menjadi Rp75,4 juta per kapita per tahun di tahun 2021. Tingkat pendapatan per kapita menurun di tahun 2020 menjadi Rp61,9 juta per kapita per tahun dari Rp66,9 juta per kapita per tahun di tahun 2019.

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang mencapai tingkat pendapatan riil per kapita terendah selama tahun 2010 sampai 2017. Sementara itu Kabupaten Gunungkidul mencapai pendapatan per kapita terendah di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

3.2 Analisis Konvergensi Sigma

Tulisan ini menggunakan Indeks Williamson dan koefisien variasi untuk menganalisis terjadinya Konvergensi Sigma melalui kecenderungan perkembangan ketimpangan pendapatan per kapita antarkabupaten/kota selama tahun 2010 sampai 2021. Data yang digunakan dalam analisis Konvergensi Sigma, yaitu PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota (dalam juta rupiah), PDRB ADHK per kapita DIY (dalam juta rupiah), jumlah penduduk kabupaten/kota (dalam jiwa), dan jumlah penduduk DIY (dalam jiwa).

Nilai Indeks Williamson dalam tulisan ini menggunakan nilai yang dihasilkan oleh BPS. Nilai koefisien variasi merupakan hasil penghitungan sendiri. Hasil perhitungan dua ukuran tersebut disajikan pada grafik berikut ini.



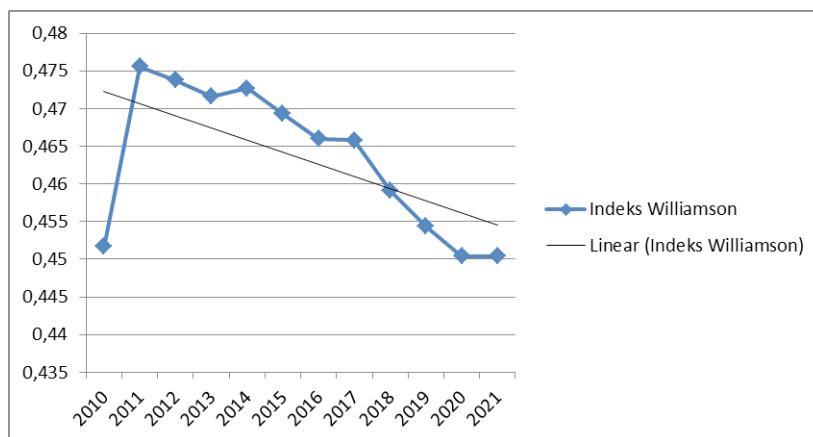
Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Gambar 3.7 Perkembangan Indeks Williamson dan Koefisien Variasi 2010–2021

Sementara itu kecenderungan masing-masing ukuran ketimpangan disajikan pada uraian berikut.

a. Indeks Williamson

Perkembangan Indeks Williamson selama tahun 2010 sampai dengan 2021 menunjukkan kecenderungan untuk menurun. Selama periode tersebut, Indeks Williamson turun dari 0,4517 (2010) menjadi 0,4504 (2021). Ketimpangan pendapatan per kapita tertinggi terjadi di tahun 2011 dengan nilai indeks sebesar 0,4756. Sementara itu, kenaikan ketimpangan juga terjadi di tahun 2014 dan 2017 dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: BPS DIY dalam Dataku

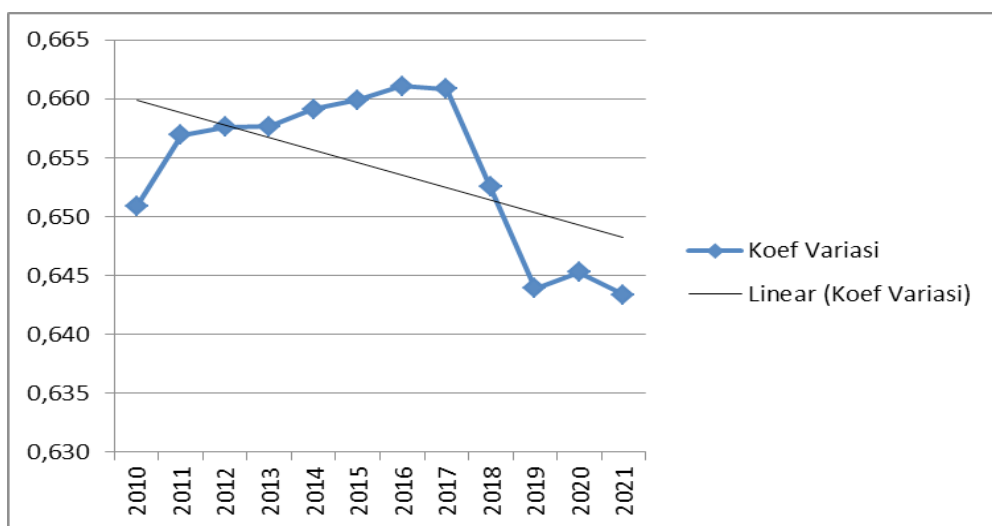
Gambar 3.8 Nilai dan Kecenderungan Perkembangan Indeks Williamson Tahun 2010–2021

Temuan serupa juga ditemukan oleh kajian Ragil (2018) dengan data tahun 2013–2016 dan Rinusara (2020) dengan menggunakan data periode 2011–2018. Ragil (2018) menemukan bahwa penurunan ketimpangan sangat kecil. Dari data dan analisis tersebut tampak

bahwa penurunan Indeks Williamson adalah 0,0252 poin yang diukur dari perkembangan indeks tersebut dari tahun 2011 ke tahun 2021. Tahun mula adalah 2011 karena pada saat tersebut nilai Indeks Williamson tertinggi pada periode 2011–2021. Sementara itu, rata-rata penurunan tiap tahun selama periode 2011–2021 adalah 0,0252 poin.

b. Koefisien Variasi

Perkembangan koefisien variasi selama tahun 2010 sampai dengan 2021 menunjukkan kecenderungan untuk menurun. Puncak ketimpangan terjadi di tahun 2017, yaitu dengan nilai koefisien sebesar 0,6608. Ketimpangan terendah terjadi di tahun 2019 dengan koefisien sebesar 0,6439.



Sumber: olahan

Gambar 3.9 Nilai dan Kecenderungan Perkembangan Koefisien Variasi Tahun 2010–2021

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Indeks Williamson dan koefisien variasi, perkembangan ketimpangan pendapatan per kapita menunjukkan penurunan ketimpangan. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi konvergensi sigma pada pendapatan per kapita. Selanjutnya, analisis deskriptif perkembangan ketimpangan dilakukan dengan menganalisis dinamika Indeks Williamson karena indikator ini yang resmi digunakan dalam dokumen pemerintah dan telah dihitung resmi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DIY.

c. Analisis Deskriptif atas Dinamika Indeks Williamson

Berikut adalah analisis perkembangan Indeks Williamson (IW) selama periode 2010 sampai dengan 2021.

i) Tahun 2010–2011

Pada periode ini terjadi peningkatan nilai IW yang sangat besar dari 0,4517 (2010) menjadi 0,4756 (2011). Pada periode ini, dua daerah yang mencapai tingkat pendapatan per kapita tertinggi (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman), mencapai pertumbuhan ekonomi secara rata-rata sebesar 5,63%, sementara tiga daerah lain hanya tumbuh secara rata-rata sebesar 4,61%.

ii) Tahun 2011–2013

Terjadi penurunan IW dari 0,4756 (2011) menjadi 0,4716 (2011). Penurunan IW disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo yang rata-rata meningkat sebesar 0,32 poin. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta justru menurun dengan rata-rata -0,18 poin selama periode tersebut. Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,22 poin pun hampir

mendekati peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman yang sebesar 0,23 poin.

iii) Tahun 2013–2014

Pada periode ini, terjadi kenaikan IW sebesar 0,0011 dari 0,4716 di tahun 2013 menjadi 0,4727 di tahun 2014. Dinamika di periode ini terjadi karena ada penurunan tingkat pertumbuhan yang cukup besar di tiga daerah yang berpendapatan terendah, yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar -0,30 poin; Kabupaten Gunungkidul dan Bantul masing-masing sebesar -0,42 poin. Sementara itu penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta adalah -0,20 poin.

iv) Tahun 2014–2021

Pada periode 2014–2020, IW secara konsisten mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -0,0031 poin. Tahun 2018 dan 2019 merupakan dua tahun dengan penurunan IW terbesar pada periode tersebut, yaitu -0,0067 poin (2018) dan -0,0047 poin (2019). Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi sangat tinggi yang dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebesar 10,84% (2018) dan 13,49% (2019). Pertumbuhan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa megaprojek di kabupaten tersebut, antara lain Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Pada tahun 2020, perekonomian DIY berkontraksi akibat dampak pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Keseluruhan DIY tumbuh sebesar -2,69%. Pertumbuhan kontraksi tertinggi terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat pertumbuhan sebesar -4,06%. Sementara itu, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta juga mengalami kontraksi lebih besar dari penurunan pertumbuhan dua daerah lainnya, yaitu masing-masing -3,91% dan

-2,42%. Kombinasi semua penurunan tersebut menyebabkan tingkat ketimpangan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 ketika perekonomian mulai bergerak kembali, Kabupaten Gunungkidul dapat tumbuh sebesar 5,22%, lebih tinggi dibandingkan Kota Yogyakarta yang sebesar 5,09%. Perekonomian Sleman tumbuh tertinggi dengan tingkat pertumbuhan 5,56%. Kombinasi dinamika semua kabupaten dan kota se-DIY menyebabkan ketimpangan pendapatan per kapita tidak berubah dibandingkan tahun 2020.

3.3 Analisis Konvergensi Beta

Analisis konvergensi beta pada tulisan ini menggunakan regresi data panel pada model persamaan (2) sebagai model dasar.

$$\ln \left(\frac{y_{i,t}}{y_{i,t-1}} \right) = \alpha + \beta \ln y_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

$$\ln y_{i,t} - \ln y_{i,t-1} = \alpha + \beta \ln y_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Di mana, y adalah pendapatan per kapita daerah i ; t adalah jumlah tahun pada periode observasi; dan ε_i adalah *error*. Konvergensi pendapatan per kapita terjadi jika nilai β_1 adalah negatif.

Sedangkan data yang digunakan dalam analisis konvergensi beta ini meliputi PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota (dalam juta rupiah); tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kabupaten/kota (dalam ribu orang); anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota (dalam rupiah); pangsa sektor industri manufaktur dalam PDRB ADHK kabupaten/kota (dalam persen); dan pangsa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB ADHK kabupaten/kota (dalam persen).

Analisis regresi berikutnya adalah melakukan regresi data panel dengan menggunakan model dasar (2) yang ditambah variabel independen sebagai variabel kontrol, yaitu:

- a) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang merupakan nilai APBD setiap tahun dalam satuan juta rupiah;
- b) angkatan kerja kabupaten/kota, yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan;
- c) pangsa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB yang merupakan persentase nilai sektor tersebut terhadap keseluruhan nilai PDRB kabupaten/kota;
- d) pangsa industri manufaktur dalam PDRB yang merupakan persentase nilai sektor tersebut terhadap keseluruhan nilai PDRB kabupaten/kota.

Data panel atas model tersebut kemudian diregresi dengan langkah-langkah sebagai berikut.

3.3.1 Estimasi Model Regresi Data Panel (Model Dasar Konvergensi Beta)

1. Model *Common Effect*

Pemodelan menggunakan *Common Effect Model* dilakukan dengan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}}\right) = 0,1174 - 0,049(\ln y_{i,t-1})$$

2. Model *Fixed Effect*

Pemodelan menggunakan *Fixed Effect Model* dilakukan dengan menggunakan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}}\right) = -0,0695(\ln y_{i,t-1}) + c_i$$

3. Model *Random Effect*

Pemodelan menggunakan *Random Effect Model* dilakukan dengan menggunakan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}}\right) = 0,1174 - 0,0049(\ln y_{i,t-1}) + \epsilon_{it}$$

Dari ketiga model yang terbentuk tersebut, akan dilakukan pemilihan model terbaik dengan uji sebagai berikut:

a. Pemilihan Model Regresi CEM dan FEM dengan Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dari model CEM. Dengan hipotesis H_0 : model CEM lebih baik dari model FEM dan H_1 : model FEM lebih baik dari model CEM. Uji Chow memperoleh $p\text{-value}$ $0,2416 > 0,05$ sehingga H_0 tidak ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model CEM lebih baik dari model FEM.

b. Pemilihan Model Regresi CEM dan REM dengan Uji Lagrange Multiplier

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada efek *random* dalam data panel, untuk memutuskan apakah model REM lebih baik dengan model CEM. Dengan hipotesis H_0 : model CEM lebih baik dari model REM dan H_1 : model REM lebih baik dari CEM. Uji Lagrange Multiplier memperoleh *p-value* $0,1716 > 0,05$ sehingga H_0 tidak ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model CEM lebih baik daripada model REM.

Berdasarkan kedua uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model Regresi Data Panel dapat diestimasi dengan pendekatan model CEM. Namun, jika kita lihat dari hasil *output* di bawah ini model terbaik adalah model FEM.

Tabel 3.1 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Variabel	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	Koef.	<i>p-value</i>	Koef.	<i>p-value</i>	Koef.	<i>p-value</i>
Konstanta	0,1174	0,3487			0,1174	0,3444
<i>ln y_{i,t-1}</i>	- 0,0049	0,5038	-0,0695	0,0223	-0,0049	0,5008
Ringkasan Statistik						
<i>R-square</i>	0,0085		0,1020		0,0085	
<i>Probability F-Statistic</i>	0,5038		0,0223		0,5008	

Sumber: olahan

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa model *Fixed Effect* mempunyai R^2 terbesar dibanding dengan model lainnya dan dari Uji F dan t menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dan variabel $\ln y_{i,t-1}$ signifikan. Sedangkan pada dua model lainnya diperoleh bahwa model CEM dan REM tidak layak digunakan dan variabel $\ln y_{i,t-1}$ tidak signifikan.

Meskipun dari Uji Lagrange Multiplier dan Uji Chow memilih menggunakan pembahasan model CEM, tetapi dengan melihat hasil tersebut tulisan memilih menggunakan model *Fixed Effect*.

$$\ln\left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}}\right) = -0,0695(\ln y_{i,t-1}) + c_i$$

Keterangan:

c_i : konstanta yang bergantung ada unit ke- i , tetapi tidak pada waktu t atau merupakan komponen kali-silangnya (*cross section*)

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konvergensi beta terjadi di kabupaten/kota di DIY tahun 2011 hingga 2021. Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien pendapatan per kapita tahun sebelumnya yang bernilai negatif (-1,0695) dan signifikan memengaruhi perubahan pendapatan per kapita. Nilai koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan per kapita di DIY tahun sebelumnya maka pertumbuhan pendapatan per kapita di DIY akan semakin lambat.

3.3.2 Model Konvergensi Beta Ditambah Variabel Independen APBD

1. Model *Common Effect*

Pemodelan menggunakan *Common Effect Model* dilakukan dengan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}}\right) = -0,3205 - 0,041(\ln y_{i,t-1}) + 0,0077(\ln APBD)$$

2. Model *Fixed Effect*

Pemodelan menggunakan *Fixed Effect Model* dilakukan dengan menggunakan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}}\right) = -0,3241(\ln y_{i,t-1}) + 0,1442(\ln APBD) + c_i$$

3. Model *Random Effect*

Pemodelan menggunakan *Random Effect Model* dilakukan dengan menggunakan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}}\right) = 0,3205 - 0,0041(\ln y_{i,t-1}) - 0,0077(\ln APBD) + \epsilon_{i,t}$$

Dari ketiga model yang terbentuk tersebut, dilakukan pemilihan model terbaik dengan uji sebagai berikut.

a. Pemilihan Model Regresi CEM dan FEM dengan Uji Chow

Uji Chow menunjukkan bahwa $p\text{-value } 0,0002 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dari model CEM.

b. Pemilihan Model Regresi FEM dan REM dengan Uji Hausman

Uji Hausman menghasilkan $p\text{-value}$ $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan tidak ada efek *random* dalam model atau dapat dikatakan bahwa model FEM lebih baik dari model REM.

Tabel 3.2 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variabel	Koefisien	$p\text{-value}$	H_0 Diterima/ Ditolak	Kesimpulan
$\ln y_{i,t-1}$	-0.3241	0.000	H_0 ditolak	Memengaruhi variabel dependen
$\ln APBD$	0.1442	0.000	H_0 ditolak	Memengaruhi variabel dependen
Ringkasan Statistik				
$R\text{-square}$	0.3650			
$Probability$ $F\text{-Statistic}$	0.0000			

Sumber: olahan

Berdasarkan hasil tersebut, secara statistik, estimasi model konvergensi ketimpangan pendapatan per kapita di DIY sudah layak digunakan. Hal ini dilihat dari nilai $p\text{-value}$ ($Probability\ F\text{-Statistic}$) sebesar 0,0000 di mana nilai ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,3650 yang berarti variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 36,50% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Persamaan yang terbentuk untuk konvergensi beta sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}} \right) = -0,3241 (\ln y_{i,t-1}) + 0,1442 (\ln APBD) + c_i$$

Keterangan:

c_i : konstanta yang bergantung ada unit ke- i , tetapi tidak pada waktu t atau merupakan komponen kali-silangnya (*cross section*)

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konvergensi beta terjadi di kabupaten/kota di DIY periode tahun 2011 hingga 2021. Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien pendapatan per kapita tahun sebelumnya yang bernilai negatif (-0,3241) dan signifikan memengaruhi perubahan pendapatan per kapita. Nilai koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan per kapita di DIY tahun sebelumnya maka pertumbuhan pendapatan per kapita di DIY akan semakin lambat.

3.3.3 Model Konvergensi Beta Ditambah Variabel Independen APBD serta Angkatan Kerja, Pangsa Pertanian, dan Pangsa Industri

1. Model *Common Effect*

Pemodelan menggunakan *Common Effect Model* dilakukan dengan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{y_{it}}{y_{i,t-1}} \right) = 0,6044 - 0,0185 (\ln y_{i,t-1}) - 0,00129 (\ln APBD) + 0,0278 (\ln TPAK) - 0,0013 (Pangsa Pertanian) + 0,0003 (Pangsa Industri)$$

2. Model *Fixed Effect*

Pemodelan menggunakan *Fixed Effect Model* dilakukan dengan menggunakan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

$$\ln \left(\frac{y_{it}}{y_{it-1}} \right) = -0,3804 (\ln y_{it-1}) + 0,1295 (\ln APBD) + 0,1253 (\ln TPAK) \\ - 0,0069 (Pangsa Pertanian) - 0,0009 (Pangsa Industri) + \epsilon_i$$

3. Model *Random Effect*

Pemodelan menggunakan *Random Effect Model* dilakukan dengan menggunakan bantuan program R dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

$$\ln \left(\frac{y_{it}}{y_{it-1}} \right) = 0,6044 - 0,0185 (\ln y_{it-1}) - 0,00129 (\ln APBD) + \\ 0,0278 (\ln TPAK) - 0,0013 (Pangsa Pertanian) + \\ 0,0003 (Pangsa Industri) + \epsilon_{it}$$

Dari ketiga model yang terbentuk tersebut, akan dilakukan pemilihan model terbaik dengan uji sebagai berikut.

a. Pemilihan Model Regresi CEM dan FEM dengan Uji Chow

Uji Chow memperoleh *p-value* $0,0000 > 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dari model CEM.

b. Pemilihan Model Regresi FEM dan REM dengan Uji Hausman

Hasil Uji Hausman memperoleh *p-value* $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan tidak ada efek *random* dalam model atau dapat dikatakan bahwa model FEM lebih baik dari model REM.

Tabel 3.3 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variabel	Koefisien	<i>p-value</i>	H ₀ Diterima/ Ditolak	Kesimpulan
<i>ln y_{it-1}</i>	-0,3804	0.000	H ₀ ditolak	Memengaruhi variabel dependen
<i>ln APBD</i>	0,1294	0.000	H ₀ ditolak	Memengaruhi variabel dependen
<i>Ln TPAK</i>	0,1253	0,1026	H ₀ diterima	Tidak memengaruhi variabel dependen
<i>Pangsa Pertanian</i>	-0,0069	0,0882	H ₀ diterima	Tidak memengaruhi variabel dependen
<i>Pangsa Industri</i>	-0,0008	0,6081	H ₀ diterima	Tidak memengaruhi variabel dependen
Ringkasan Statistik				
R-square	0.4353			
Probability F-Statistic	0.0000			

Sumber: olahan

Dari hasil tersebut, secara statistik, estimasi model konvergensi ketimpangan pendapatan per kapita di DIY sudah layak digunakan. Hal ini dilihat dari nilai *p-value* (*Probability F-Statistic*) sebesar 0,0000 di mana nilai ini kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai R² yang diperoleh adalah sebesar 0,4353 yang berarti variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 43,53% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Persamaan yang terbentuk untuk konvergensi beta sebagai berikut.

$$\ln \left(\frac{y_{it}}{y_{it-1}} \right) = -0,3804 (\ln y_{it-1}) + 0,1295 (\ln APBD) + 0,1253 (\ln TPAK) \\ - 0,0069 (Pangsa Pertanian) - 0,0009 (Pangsa Industri) + c_i$$

Keterangan:

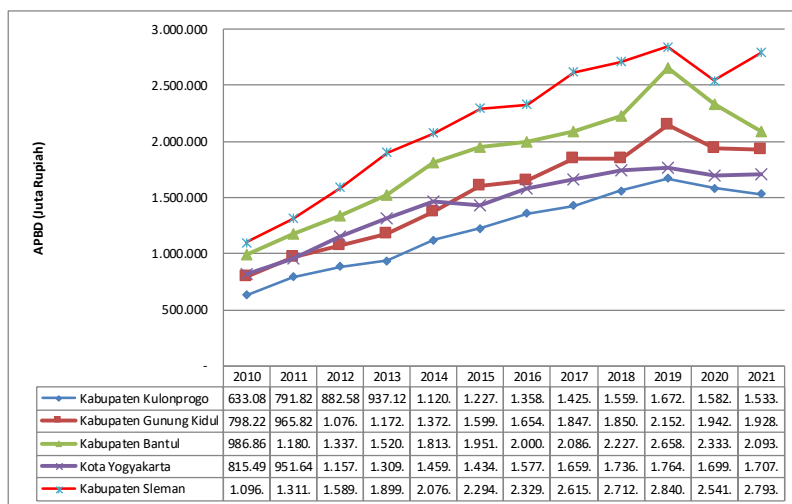
c_i : konstanta yang bergantung ada unit ke- i , tetapi tidak pada waktu t atau merupakan komponen kali-silangnya (*cross section*)

Kesimpulan yang didapat dari persamaan regresi adalah sebagai berikut.

1. Konvergensi beta terjadi di kabupaten dan kota di DIY periode tahun 2010 hingga 2021. Temuan ini membuktikan bahwa hipotesis konvergensi pendapatan per kapita antarkabupaten dan kota se-DIY terjadi pada periode 2010 hingga 2021 dan hipotesis ini juga dibuktikan dengan analisis konvergensi sigma. Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien pendapatan per kapita tahun sebelumnya yang bernilai negatif (-0,3804) serta signifikan memengaruhi perubahan pendapatan per kapita. Nilai koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan per kapita di DIY tahun sebelumnya maka kenaikan pendapatan per kapita di DIY akan semakin rendah.
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja, pangsa pertanian, dan industri dalam PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pendapatan per kapita.
3. APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan per kapita. Koefisien positif pada variabel APBD menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif APBD terhadap perubahan pendapatan per kapita. Jika APBD meningkat maka akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita.

3.4 Analisis Deskriptif Pengaruh APBD terhadap Penurunan Ketimpangan Pembangunan

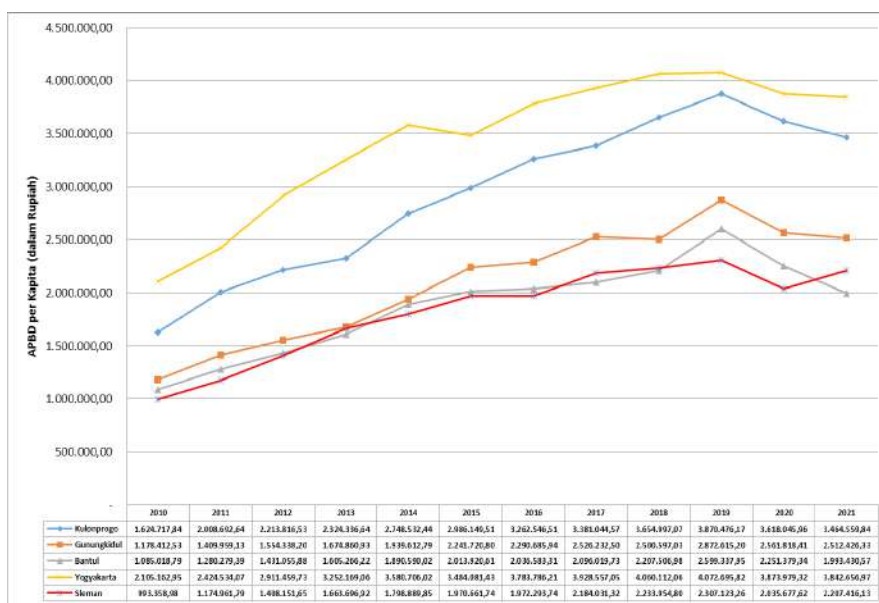
Hasil analisis konvergensi beta menemukan bahwa APBD merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi potensi pengurangan ketimpangan dengan mempunyai pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan per kapita. Temuan ini berimplikasi bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan meningkat seiring dengan kenaikan besaran APBD. Temuan ini selaras dengan kajian Nurhayati (2017) yang menemukan bahwa belanja modal pemerintah yang merupakan bagian dari APBD, mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagi upaya pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah, kenaikan nilai APBD di wilayah yang kurang sejahtera dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita wilayah tersebut serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sementara itu, perkembangan APBD tiap wilayah selama periode tahun 2010 sampai 2021 adalah sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 3.10 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota se-DIY Tahun 2010–2021

Kabupaten Sleman sebagai wilayah paling sejahtera kedua merupakan wilayah yang mempunyai APBD tertinggi. Di lain pihak, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu wilayah kurang sejahtera mempunyai kapasitas APBD terendah. Sementara itu, kabupaten lain yang kurang sejahtera, yaitu Kabupaten Bantul dan Gunungkidul adalah wilayah yang mempunyai kapasitas APBD di urutan kedua dan ketiga. Lebih lanjut, nilai APBD per kapita antarkabupaten dan kota selama periode yang sama disajikan sebagai berikut.



Sumber: Olahan

Gambar 3.11 Perkembangan APBD per Kapita Kabupaten dan Kota se-DIY Tahun 2010–2021

Berdasarkan nilai APBD per kapita, wilayah yang memiliki APBD per kapita tertinggi adalah Kota Yogyakarta. Urutan berikutnya adalah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sementara itu, posisi Kabupaten Sleman dan Bantul relatif sama di wilayah yang memiliki APBD per kapita terendah.

Mengingat APBD per kapita yang relatif lebih rendah di daerah yang kurang sejahtera, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi APBD sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pendapatan per kapita daerah, yaitu:

- a. Meningkatkan intervensi dan alokasi anggaran pemerintah di tiga kabupaten tersebut. Terbatasnya APBD menunjukkan kapasitas fiskal masih belum mendukung upaya peningkatan belanja pemerintah untuk mengintervensi masyarakat. Peningkatan intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran dan intervensi pemerintah yang lebih besar di kabupaten yang masih relatif kurang sejahtera.
- b. Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan intervensi pemerintah dan alokasi anggaran yang terbatas dengan peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan desain intervensi dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sasaran baik dari sisi penentuan lokus, kelompok penerima manfaat, maupun jenis intervensi. Berdasarkan indikasi tersebut, pemerintah kabupaten di dua daerah tersebut harus melakukan evaluasi atas rencana pembangunannya untuk memperbaiki desain program dan kegiatan serta besaran alokasi anggaran untuk dapat meningkatkan dampak intervensi tersebut terhadap kenaikan *output* daerah. Alokasi anggaran dan jenis intervensi yang memadai dapat dilakukan untuk melaksanakan upaya-upaya yang disarankan pada poin a dengan desain program dan kegiatan serta lokus dan lapangan usaha atau sektor ekonomi yang tepat. Mengingat faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka

mengurangi ketimpangan pembangunan (Rinusara, 2020), sektor ekonomi yang tepat hendaknya merupakan sektor unggulan yang telah teridentifikasi serta merupakan bagian sektor ekonomi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selama ini, beberapa aturan dari Pemerintah Pusat menghalangi potensi alokasi yang besar untuk meningkat kinerja sektor ekonomi secara langsung. Contoh aturan yang dimaksud adalah alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dan pendidikan 20%. Alokasi yang sudah diatur sedemikian rupa, mengurangi pangsa anggaran yang tidak terlalu besar untuk dapat digunakan dalam upaya peningkatan kinerja industri maupun subsektor lain dalam aktivitas perekonomian. Hal ini semestinya mendorong Pemerintah Daerah untuk mencoba menerapkan prinsip *value for money* yang optimal dalam rangka mengoptimalkan manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam intervensinya. Desain program, kegiatan, dan subkegiatan yang baik dan tepat merupakan langkah untuk mewujudkan manfaat yang optimum dari intervensi pemerintah.

- c. Upaya peningkatan kualitas perencanaan juga harus diikuti dengan praktik implementasi *monitoring* dan evaluasi (monev) yang memadai. Pelaksanaan monev yang baik, efektif, dan akuntabel dapat digunakan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Upaya peningkatan besaran anggaran maupun intensitas intervensi pemerintah yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pembangunan di daerah yang kurang sejahtera juga diharapkan untuk mengimbangi terbatasnya investasi di daerah-daerah tersebut. Secara

empiris, penanaman modal baik dalam negeri maupun asing telah mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY (Wahudin dan Yulidadi, 2013; Budidharma, 2015; Dagu dan Widayat, 2017). Selama ini, penanaman modal asing dan modal dalam negeri lebih banyak dilakukan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya penanaman modal di Kabupaten Sleman mendorong kabupaten tersebut mencapai tingkat *output* daerah dan pendapatan per kapita yang relatif tinggi meskipun APBD per kapita terendah.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2021, terjadi lonjakan penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Kulon Progo yang disebabkan oleh proyek pembangunan YIA dan pembangunan megaprojek lainnya. Meskipun demikian, terdapat potensi bahwa perkembangan investasi di kabupaten tersebut akan menurun ketika tidak ada megaprojek lanjutan. Sementara itu, di dua daerah yang relatif kurang sejahtera lainnya, tidak ada peningkatan penanaman modal yang signifikan karena dua daerah tersebut bukan lokus megaprojek.

Selain untuk mengimbangi terbatasnya investasi, intervensi pemerintah yang diharapkan dapat ditingkatkan harus juga ditujukan untuk menarik investasi. Intervensi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung investasi, seperti transportasi, energi, dan air yang memadai akan meningkatkan daya tarik investasi. Hal itu juga harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun kesehatan. Penelitian Cahyo (2016) dan Budidharma (2015) menemukan bahwa peningkatan pembangunan manusia atau modal manusia, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal lain yang sangat penting dalam mendatangkan investasi adalah kepastian usaha dan

penggunaan lahan. Upaya intervensi terkait dengan strategi tersebut adalah dengan meningkatkan penegakan aturan terkait dengan izin usaha serta manajemen tata kelola ruang yang tepat dan kondusif bagi sektor swasta untuk mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut, intervensi pemerintah melalui pelaksanaan APBD dapat diarahkan untuk peningkatan investasi masyarakat lokal yang akan menjadi sumber pertumbuhan yang mendorong dinamika perekonomian lokal serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Identifikasi potensi sumber daya lokal yang baik dan objektif sangatlah diperlukan untuk menjadi materi pertimbangan utama dalam penyusunan desain program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka mengembangkan potensi yang ada untuk lebih produktif. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat lokal dan meningkatkan *output* daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas intervensi dalam skema-skema pengembangan kluster industri kecil dan usaha kecil dan menengah yang telah ditetapkan sebagai lokus prioritas merupakan langkah penting dalam pengembangan ekonomi lokal.

Lebih lanjut, ketimpangan antarkabupaten/kota juga dipengaruhi oleh ketimpangan yang terjadi di dalam masing-masing wilayah. Penelitian Desembriarto dan Yunawan (2021) menemukan bahwa ketimpangan pembangunan antarkapanewon meningkat pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, dinamika ketimpangan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa wilayah yang didominasi kawasan perkotaan mencapai tingkat kinerja ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang didominasi kawasan perdesaan. Untuk mengurangi ketimpangan antarkabupaten dan kota, upaya peningkatan kapasitas ekonomi lokal di daerah yang didominasi kawasan perdesaan harus dilakukan. Intervensi

peningkatan kapasitas perekonomian kawasan perdesaan akan mendorong pengurangan ketimpangan di tingkat kabupaten dan kota.

3.5 Solusi Mengatasi Permasalahan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarkabupaten/Kota di DIY

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah di DIY yang ditandai dengan ketimpangan pendapatan per kapita antarkabupaten dan kota se-DIY. Hal tersebut membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antarberbagai pihak yang diwujudkan dengan berbagai bentuk program dan kegiatan.

Peningkatan intervensi pemerintah bagi daerah yang relatif kurang sejahtera antara lain dapat didukung oleh alokasi anggaran pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun APBD DIY di daerah yang relatif kurang sejahtera, seperti Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Alokasi kegiatan dan program serta alokasi dana yang memadai di daerah yang kurang sejahtera akan menggerakkan perekonomian lokal sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kapasitas ekonomi, dan pendapatan per kapita.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas desain program, kegiatan, dan subkegiatan, serta penentuan lokus dan lapangan usaha target intervensi yang tepat. Salah satu intervensi yang harus ditingkatkan adalah upaya untuk meningkatkan penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri, di daerah yang relatif kurang sejahtera. Pemerintah daerah juga harus dapat mengembangkan potensi produktif lokal agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan daerah setempat serta *output* daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang didominasi kawasan perdesaan akan mendorong kemampuan perekonomian wilayah yang kurang sejahtera untuk *catching up* dengan daerah yang lebih sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, D. N., & Puspitawati, H. (2016). Ketimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(1), 71–85.
- Bappeda DIY. (2021). *Analisis Makroekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223-251.
- BPS Kabupaten Bantul (2013) *Kabupaten Bantul dalam Angka 2012*
- BPS Kabupaten Bantul (2015) *Kabupaten Bantul dalam Angka 2014*
- BPS Kabupaten Bantul (2017) *Kabupaten Bantul dalam Angka 2016*
- BPS Kabupaten Bantul (2019) *Kabupaten Bantul dalam Angka 2018*
- BPS Kabupaten Bantul (2021) *Kabupaten Bantul dalam Angka 2020*
- BPS Kabupaten Bantul (2022) *Kabupaten Bantul dalam Angka 2021*
- BPS Kabupaten Gunungkidul (2013) *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2012*
- BPS Kabupaten Gunungkidul (2015) *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2014*
- BPS Kabupaten Gunungkidul (2017) *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2016*

BPS Kabupaten Gunungkidul (2019) *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2018*

BPS Kabupaten Gunungkidul (2021) *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2020*

BPS Kabupaten Gunungkidul (2022) *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2021*

BPS Kabupaten Kulon Progo (2013) *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2012*

BPS Kabupaten Kulon Progo (2015) *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014*

BPS Kabupaten Kulon Progo (2017) *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2016*

BPS Kabupaten Kulon Progo (2019) *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2018*

BPS Kabupaten Kulon Progo (2021) *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2020*

BPS Kabupaten Kulon Progo (2022) *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2021*

BPS Kabupaten Sleman (2013) *Kabupaten Sleman dalam Angka 2012*

BPS Kabupaten Sleman (2015) *Kabupaten Sleman dalam Angka 2014*

BPS Kabupaten Sleman (2017) *Kabupaten Sleman dalam Angka 2016*

BPS Kabupaten Sleman (2019) *Kabupaten Sleman dalam Angka 2018*

BPS Kabupaten Sleman (2021) *Kabupaten Sleman dalam Angka 2020*

BPS Kabupaten Sleman (2022) *Kabupaten Sleman dalam Angka 2021*

BPS Kota Yogyakarta (2013) *Kota Yogyakarta dalam Angka 2012*

BPS Kota Yogyakarta (2015) *Kota Yogyakarta dalam Angka 2014*

BPS Kota Yogyakarta (2017) *Kota Yogyakarta dalam Angka 2016*

BPS Kota Yogyakarta (2019) *Kota Yogyakarta dalam Angka 2018*

BPS Kota Yogyakarta (2021) *Kota Yogyakarta dalam Angka 2020*

BPS Kota Yogyakarta (2022) *Kota Yogyakarta dalam Angka 2021*

BPS Provinsi DIY (2013) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2012*

BPS Provinsi DIY (2015) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2014*

BPS Provinsi DIY (2017) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016*

BPS Provinsi DIY (2019) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2018*

BPS Provinsi DIY (2021) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2020*

BPS Provinsi DIY (2022) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2021*

Budidharma, Imam. (2015). *Pengaruh Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*. <http://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/76-pengaruh-modal-manusia-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-daerah-istimewa-yogyakarta>, diunduh 23 Juni 2022.

Cahyo, I.D. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2000–2015)*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33080/Jurnal%20PDF.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, diunduh 25 Juni 2022.

- Dagu, Oktavianus D & Wahyu Widayat. (2017.) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1980–2015*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/110664>, diunduh 24 Juni 2022.
- Desembriarto, Dionysius & Galang Yunawan. (2021). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi antarkapanewon se-Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perencanaan*, Vol. VIII.
- Hutama, Lutfi Wahyu, & Ghozali Maski. (2018). *Analisis Konvergensi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB per Kapita Antarprovinsi di Indonesia*. Tesis Universitas Brawijaya.
- Kharisma, Bayu dan Samsubar Saleh. (2013). Convergence of Income among provinces in Indonesia 1984-2008: A panel data approach. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 28, No. 2. <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6221/17466>, diunduh 11 Februari 2022.
- Kumara, Bima Prasetya, Toto Gunarto, & Arivin Ratih. (2021). Disparitas dan konvergensi pendapatan per kapita provinsi di kawasan timur. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 21, No. 1, Juli. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/7166/pdf_151, diunduh 12 Februari 2022.
- Kuncoro, Murdrajad. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Muta'ali, Lutfi. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG).
- Nurhayati, Siti. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*.

- Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24922/2/13810100_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diunduh 23 Juni 2022.
- Prastowo, dkk. (2014). *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Infid.
- Ragil, Chandra. (2018). Analisis Ketimpangan Wilayah Antarkabupaten/ Kota Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XIII Tahun 2018*. <https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/962>, diunduh 13 Mei 2022.
- Rinusara, Novita Mukti. (2020). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah Antarkabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang. http://digilibfeb.ub.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YWMwNDJhZThlNTMzMmE5YmE1ZTgzNzNjNGJhN2MwNGFlZTI3OGNkOA==.pdf, diunduh 14 Februari 2022.
- Sachs, Jeffry D & Felipe Larrain. (1993). *Macroeconomics in the Global Economy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Simbolon, Tiur Roida. (2009). *Analisis Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antardaerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatra*. <https://osf.io/xzmr9>, diunduh 25 Juni 2022.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori, dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media. Cetakan Pertama.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudin, Didin & Imamudin Yuliadi. (2013). Determinan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan*

Studi Pembangunan. Volume 14, Nomor 2, Oktober, <https://journal.umi.ac.id/index.php/esp/article/view/1255/1312>, diunduh 25 Juni 2022.

Wijayanto, Anton Tri. (2016). Analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000–2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16, No. 02. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12569>, diunduh 12 Februari 2022.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

